



**DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA MEDAN**

# RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA 2027

**Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Medan**





## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Pemerintah Kota Medan diwajibkan untuk menyiapkan dan menyusun Rancangan Awal (Ranwal) Renja Tahun 2027 berpedoman kepada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

Dalam Penyusunan Ranwal Renja ini, diuraikan hal-hal yang menjadi tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, pendanaan dan indikator kinerja dari masing-masing satuan unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Demikian Ranwal Renja Tahun 2027 ini disusun sebagai penjabaran dari sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2027 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai dasar atau tahapan awal untuk menyusun Rancangan Akhir Renja setelah dilakukan pembahasan dalam Forum SKPD maupun Musrenbang RKPD dan menjadikan dokumen akhir Renja (final) setelah ditetapkannya RKPD Tahun 2027.

Medan, Februari 2026  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Melvi M. Mahayana, S. T., M. Si.  
Pembina Tk. II (17b)  
NIP 197707061996022001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar gambar.....	iv
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan .....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	11
Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 .....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	35
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	36
2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	46
2.4.1 Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup.....	46
2.4.2 Isu Strategis.....	49
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	51
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	58
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	58
3.1.1. Bidang Lingkungan Hidup .....	59
3.2. Pemetaan Kebijaksanaan Nasional dan Daerah .....	60
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	72
4.1 Program Dan Kegiatan .....	73
4.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah .....	95
Bab V Penutup.....	96

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025 .....	14
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	24
Tabel 2.3 (Tc.30) Pencapaian Kinerja Dan Realisasi Tujuan, Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	34
Tabel 2.4 Data Statistik Sektoral Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024.....	43
Tabel 2.5 Isu Stategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	50
Tabel 2.6 (Tc.31) Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd Tahun 2027 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan .....	52
Tabel 3.1 Dukungan Terhadap Astacita Presiden Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan .....	62
Tabel 3.2 Dukungan Terhadap 17 Prioritas Nasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	64
Tabel 3.3 Dukungan Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan .....	65
Tabel 3.4 Dukungan Terhadap Visi Misi Walikota Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	67
Tabel 3.5 Dukungan Terhadap Program Prioritas 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan .....	69
Tabel 4.1 Rincian Belanja SKPD Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2027 .....	79
Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	84
Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan, Penjualan Pupuk Kompos dan Sedot Tinja Desember Tahun 2025.....	95

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja Opd Kabupaten/Kota.....	4
Gambar 1.2 Skema Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran .....	6
Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah.....	7



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2027 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan



f. penetapan.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Medan juga merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025-2029.

Renja SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya.

Bagi Dinas Lingkungan Hidup, Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2027 merupakan pedoman untuk menyempurnakan Ranwal Renja SKPD dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2027. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2027, RPJP Kota Medan, RPJMD Kota Medan, dan Ranwal RKPD Kota Medan Tahun 2027 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.

Sebagai rancangan awal dokumen resmi Pemerintah Daerah, Ranwal Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Ranwal RKPD dan Ranwal Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan



program kegiatan perangkat daerah. Sebagai rencana operasional, Ranwal RKPD merupakan pedoman awal dalam penetapan RKPD dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan RAPBD.

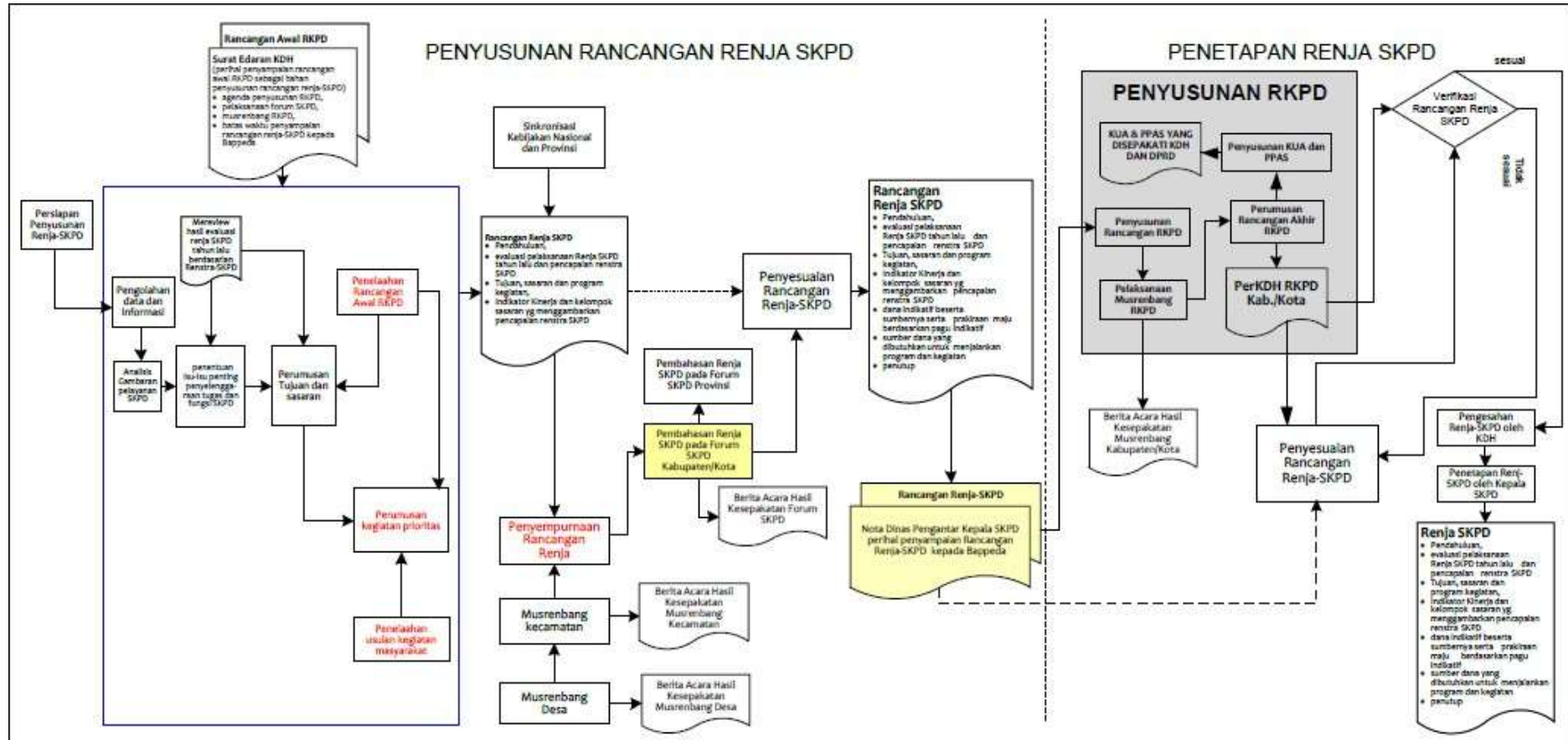
Selanjutnya Ranwal Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renja SKPD melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah maupun Musrenbang RKPD yang kedepannya dijadikan acuan dalam penyusunan RKA SKPD dan kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027.

Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung program penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
2. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.



### RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN TAHUN 2027



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota



Adapun tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan OPD;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan kegiatan prioritas
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
- Pembahasan forum OPD; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

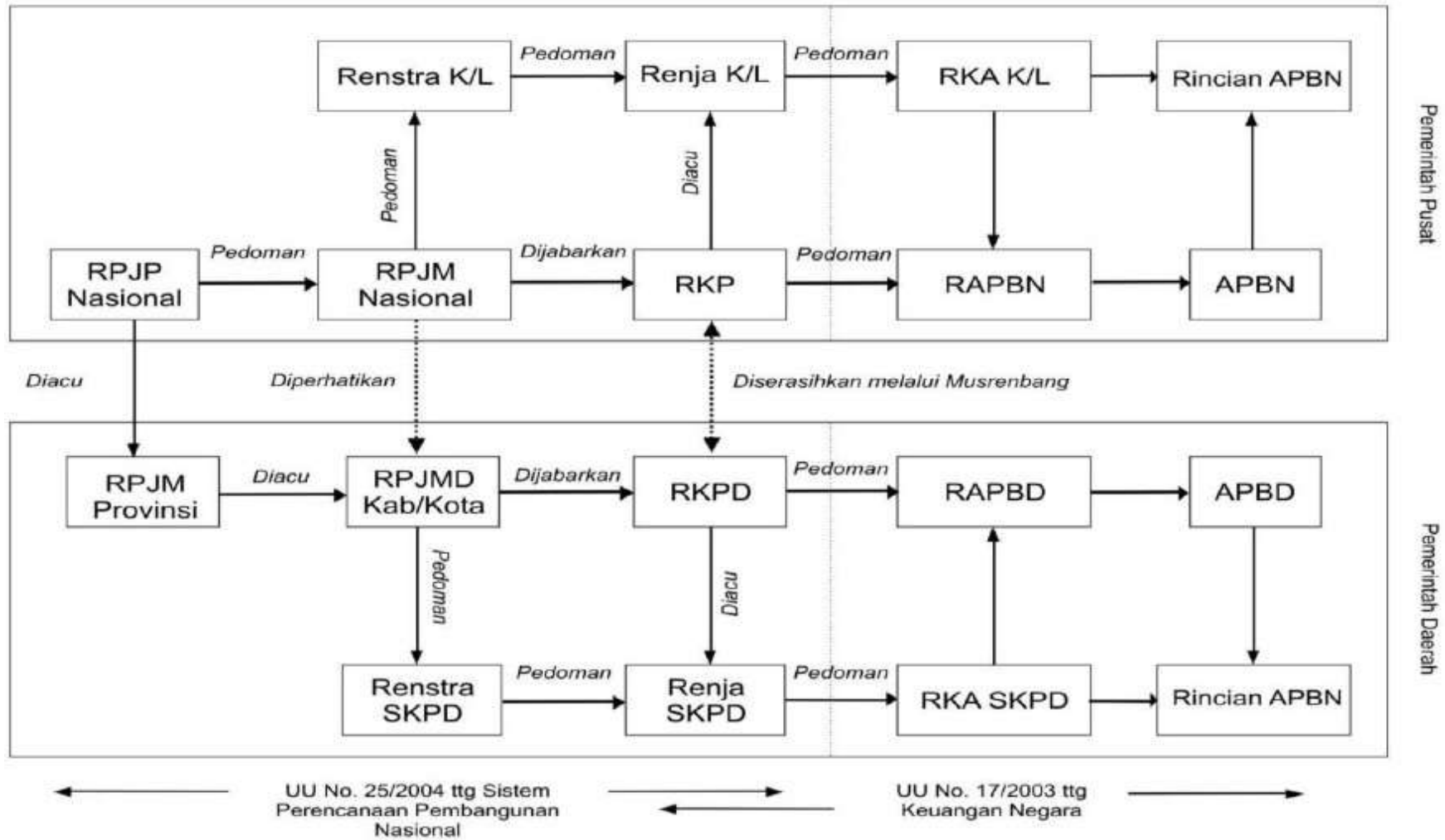
e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja

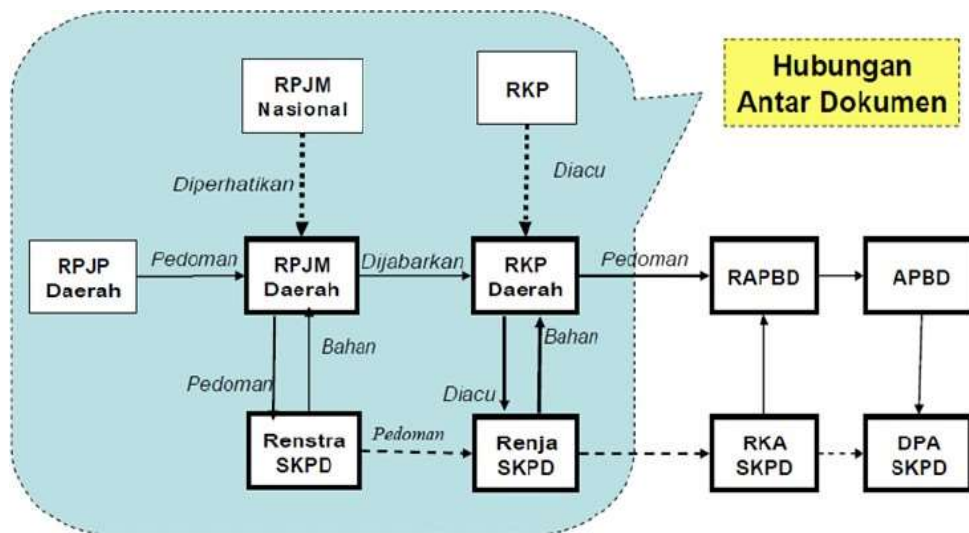


Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:

**GAMBAR 1.2 SKEMA HUBUNGAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**



Keterkaitan antara rencana kerja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah dimana Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3  
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  13. Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RRPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang



- Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
  22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan
  23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan
  24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2022-2042;
  26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan
  27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan Tahun 2025-2045;
  28. Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;



29. Peraturan Walikota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Sampah
30. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
31. Peraturan Walikota Medan Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelayanan Kebersihan di Kota Medan
32. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dari penyusunan Ranwal Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2027 ini adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah di Tahun 2027. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai acuan dalam menyusun dan menetapkan dokumen Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2027;
2. Mengetahui kinerja Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2027 periode tahun sebelumnya;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan rancangan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2027;
4. Memprakirakan usulan maju program dan kegiatan yang berkelanjutan pada Tahun 2027;
5. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Medan Tahun 2027 berdasarkan Ranwal RKPD Kota Medan Tahun 2026; dan
6. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan draft awal Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2027 dan dasar penyusunan draft awal Rencana Aksi Kinerja (RAK) serta Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2027



serta menjadi acuan awal penyusunan *Logical Framework* atau Pohon Kinerja Tahun 2027.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2027 adalah sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

Bab I. Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

**BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU**

Bab II. berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab III. berisi tentang Telaah Terhadap Kebijakan Nasional. Tujuan dan Sasaran Renja.

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Bab IV. menguraikan rencana program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilengkapi dengan indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB V. PENUTUP**

Bab V. berisi penutup, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2027 diperlukan evaluasi hasil capaian Renja tahun 2025 dan perkiraan pencapaian Renja tahun 2026. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2025 secara umum Dinas Lingkungan Hidup telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi walaupun ada beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya, dalam evaluasinya dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

##### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



## B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2025

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melaksanakan 11 program dengan 21 kegiatan dan 52 sub kegiatan. Pagu dana yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 71.821.509.958,-. Oleh karena terjadi perubahan asumsi penerimaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 maka di beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan mengalami perubahan dan efisiensi anggaran. Maka secara keseluruhan pagu Perubahan APBD T.A. 2025 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan turun menjadi Rp. 69.431.655.635,- atau mengalami penurunan pagu sekitar Rp. 2.389.854.323,- (33,27%) dari pagu APBD Murni T.A. 2025. Adapun realisasi keuangan terhitung tgl 31 Desember 2025 sebesar Rp. 55.214.740.659 atau sekitar 76,88%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

## C. Perkiraan Capaian Tahun Anggaran 2026

Pada Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, melaksanakan 11 program dengan 21 kegiatan dan 52 sub kegiatan. Pagu dana yang dikelola adalah sebesar Rp 138.812.378.140. Perkiraan capaian pada tahun 2026 diperkirakan akan lebih maksimal kondisinya dibanding tahun 2025.



Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025, dan perkiraan capaian realisasi target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan diuraikan dalam tabel 2.1, 2.2 dan 2.3

**TABEL 2.1**  
**EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN TAHUN 2025**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome	Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi		Target Kinerja		Realisasi		Keterangan	
					Anggaran	%			Kinerja	%		
1	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Meningkatnya Layanan Persampahan Regional</b>	<b>Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)</b>	Rp 5.579.377.600	Rp 1.336.695.223	24%	93,44	%	96,340	%	103 %	- Lokasi tidak dapat - Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah - Untuk tanah timbun waktu tidak cukup Untuk dilaksanakan (P APBD)
1,1	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terselenggaranya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp 5.579.377.600	Rp 1.336.695.223	24%	4	Doku men	3	Doku men	75%	Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah
1.1.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS- 3R	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	Rp 600.000.000	Rp -	0%	1300	Ton/ Hari	1615	Ton/ Hari	124 %	Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah
1.1.2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	Rp 531.650.000	Rp 149.056.552	28%	1300	Ton/ Hari	1615	Ton/ Hari	124 %	1. Pemasangan Kanopi Bank Sampah Permata Hati 2. Pengecoran Halaman Bank Sampah Permata Hati
1.1.3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Rp 348.000.000	Rp 21.600.000	6%	10	Doku men	4	Doku men	40%	Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah
1.1.4	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Teroptimisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	Rp 4.099.727.600	Rp 1.166.038.671	28%	1	Unit	1	Unit	100 %	Peruntukan untuk • Tanah timbun
2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Nilai Sakip Perangkat Daerah	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)</b>	Rp 59.889.477.588	Rp 50.642.061.646	85%	B		B		100 %	Tercapai
2,1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rp 5.400.000	Rp 3.600.000	67%	15	Doku men	15	Doku men	100 %	Tercapai



2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 5.400.000	Rp 3.600.000	67%	4	Doku men	4	Doku men	100 %	1. Forum OPD 2. RKA 3. DPA 4. LPPD/LKJiP
<b>2,2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 22.868.882. 578</b>	<b>Rp 17.905.994 .521</b>	<b>78%</b>	<b>26</b>	Doku men	<b>26</b>	Doku men	100 %	Tercapai
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 22.756.562.5 78	Rp 17.831.234. 521	78%	128	Orang / Bulan	135	Orang / Bulan	105 %	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK
2.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 112.320.000	Rp 74.760.000	67%	12	dokum en	12	Doku men	100 %	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
<b>2,3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>0%</b>	<b>2</b>	dokum en	<b>0</b>	doku men	0%	Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah
2.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rp -	Rp -	0%	0	Paket	0	Paket	0%	Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah
2.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp -	Rp -	0%	0		0		0%	Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah
2.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp -	Rp -	0%	0	Orang	0	Orang	0%	Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah
<b>2,4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 16.182.739. 440</b>	<b>Rp 14.085.010 .336</b>	<b>87%</b>	<b>9</b>	dokum en	<b>8</b>	doku men	89%	Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 16.230.638	Rp 15.895.755	98%	1	Paket	1	Paket	100 %	Tercapai
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 149.993.050	Rp 92.874.810	62%	2	Paket	1	Paket	50%	Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah
2.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp 43.521.505	Rp 43.233.501	99%	1	Paket	1	Paket	100 %	Tercapai



2.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 15.098.568.722	Rp 13.545.085.992	90%	6	Paket	4	Paket	67%	- Bahan Bakar Minyak/ Pelumas - ATK (Alat Tulis Kantor) dan Kegiatan kantor lainnya - Kertas dan Cover - Bahan Komputer berupa Pengadaan Tinta dan Catridge Printer - Benda Pos berupa Meterai - Adanya Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah
2.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 175.634.625	Rp 53.813.000	31%	3	Paket	3	Paket	100%	Tercapai
2.4.6	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Rp -	Rp -	0%	0	Paket	0		0%	Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah
2.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 50.950.600	Rp 16.655.750	33%	50	Laporan	90	Laporan	180%	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 413.840.300	Rp 174.451.528	42%	150	Laporan	150	Laporan	100%	- Bahan Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Perjalanan dinas biasa
2.4.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 234.000.000	Rp 143.000.000	61%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli
2,5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah RKB</b>	<b>Rp 4.345.142.700</b>	<b>Rp 3.989.229.000</b>	<b>92%</b>	<b>14</b>	Unit	<b>13</b>	Unit	93%	Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah
2.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Rp 4.114.674.000	Rp 3.790.095.000	92%	3	Unit	3	Unit	100%	- Pengadaan mobil toilet - Pengadaan truck arm rool kap 6 M3 - Pengadaan truck compactor kap 7 M3
2.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp 230.468.700	Rp 199.134.000	86%	10	Unit	19	Unit	190%	Tercapai
2,6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 7.994.426.015</b>	<b>Rp 7.523.623.387</b>	<b>94%</b>	<b>3</b>	Dokumen	<b>3</b>	Dokumen	100%	Tercapai
2.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 31.400.000	Rp 6.749.000	21%	1	Laporan	1	Laporan	100%	Tercapai: Belanja paket dan pengiriman



2.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 319.455.075	Rp 94.306.792	30%	3	Laporan	3	Laporan	100%	Tercapai - Belanja tagihan air dan listrik - Belanja sewa Software - Zoom Meeting
2.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 7.643.570.940	Rp 7.422.567.595	97%	13	Laporan	13	Laporan	100%	Tercapai : Pembayaran Gaji Tenaga Non ASN dan lembur
2,7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 8.418.886.855</b>	<b>Rp 7.112.756.952</b>	<b>84%</b>	<b>290</b>	Unit	<b>212</b>	Unit	73%	<b>Tidak semua barang yang rusak</b>
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp -	Rp -	-	0	Unit	0	%	0%	Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah
2.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp 7.563.194.105	Rp 6.684.324.964	88%	45	Unit	27	Unit	60%	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional alat berat
2.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp 316.000.000	Rp 159.440.800	50%	160	Unit	100	Unit	63%	Pemeliharaan : - pemeliharaan cctv dan perangkat pendukung - pemeliharaan mesin fotocopy - pemeliharaan peralatan elektronik - Pemeliharaan Mesin Fotocopy - pemeliharaan komputer
2.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Rp 317.092.750	Rp 210.760.588	66%	3	Unit	3	Unit	100%	Tercapai
2.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Rp 222.600.000	Rp 58.230.600	26%	82	Unit	82	Unit	100%	Tercapai
2,8	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Terselenggaranya penataan organisasi</b>	<b>Jumlah Dokumen Penataan Organisasi</b>	<b>Rp 74.000.000</b>	<b>Rp 21.847.450</b>	<b>30%</b>	<b>40</b>	Dokumen	20	Dokumen	50%	Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah
2.8.1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp 74.000.000	Rp 21.847.450	30%	40	Dokumen	20	Dokumen	50%	- Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia



3	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP</b>	<b>Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)</b>	Rp 195.600.000	Rp 190.800.000	98%	100	%	100	%	100	%	<b>Tercapai</b>
3,1	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terselenggaranya Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia</b>	Rp 195.600.000	Rp 190.800.000	98%	2	Doku men	2	Doku men	100	%	<b>Tercapai</b>
3.1.1	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	RPPLH kabupaten/kota yang disusun	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Rp 195.600.000	Rp 190.800.000	98%	2	Doku men	2	Doku men	100	%	Belanja Jasa Tenaga Ahli
3,2	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terselenggaranya penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)</b>	<b>Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai</b>	Rp -	Rp -	-	1	Doku men	0	Doku men	0%		Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah
3.2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	Rp -	Rp -	-	1	Doku men	0	Doku men	0%		Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah
4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks Kualitas Air (Indeks) Indeks Kualitas Udara (Indeks)</b>	Rp 2.254.631.140	Rp 1.252.013.650	56%		1. IKA : 54,11 2. IKU : 80,49	%	1. IKA : 74,56 2. IKU : 75,91	%	1. IKA : 137,79 2. IKU : 94,42	Masa pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup berkurang dan ada Beberapa kegiatan diPengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah
4,1	<b>Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terselenggaranya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen / Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Tersedia</b>	Rp 2.252.831.140	Rp 1.251.113.650	56%	3	Doku men	3	Doku men			Tercapai
4.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp 1.303.748.600	Rp 841.418.700	65%	7	Doku men	6	Doku men	86%		1. Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai (9 Sungai) 2. Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan di TPA 3. Laporan Pemantauan Kualitas Air Danau (5 Danau) 4. Laporan Pemantauan Kualitas Air Limbah (100 Pelaku Usaha) 5. Laporan Pemantauan Kualitas Udara Roadside (5 Titik Lokasi Pemantauan selama 5 bulan) 6. Laporan Pemantauan Kualitas Emisi Sumber Tidak Bergerak (100 Pelaku Usaha)



4.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Rp 105.062.540	Rp 43.274.950	41%	5	Doku men	3	Doku men	60%	Kegiatan Sudah Terlaksana
4.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Rp 844.020.000	Rp 366.420.000	43%	3	Doku men	2	Doku men	67%	Pelaksanaan Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Belanja Pemeliharaan AQMS telah terlaksana 100%
4,2	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terselenggaranya penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi</b>	<b>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)</b>	<b>Rp 900.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>0%</b>	<b>1</b>	Lapora n	1	Lapor an	100 %	Tercapai
4.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	Rp 900.000	Rp 900.000	100 %	1	Lapora n	1	Lapor an	100 %	Tercapai
4,3	<b>Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terselenggaranya pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan</b>	<b>Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 900.000</b>	<b>Rp 900.000</b>	<b>100 %</b>	<b>4</b>	Doku men	4	Doku men	100 %	<b>Sangat tercapai</b>
4.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/ atau Provinsi dan/ atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Rp 900.000	Rp 900.000	100 %	1	Doku men	4	Doku men	400 %	Sangat tercapai
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (Persentase)	<b>Rp 566.860.000</b>	<b>Rp 284.135.358</b>	<b>50%</b>	<b>6,73</b>	%	<b>6,73</b>	%	100 %	Pelaksanaan penanaman pohon ditangguhkan. Harus menyusun DED dulu
5,1	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terselenggaranya pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 566.860.000</b>	<b>Rp 284.135.358</b>	<b>50%</b>	<b>2</b>	Doku men	<b>2</b>	Doku men	100 %	Tercapai
5.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terselenggaranya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp 265.180.000	Rp 194.351.010	73%	3	Ha	3	Ha	100 %	Tercapai
5.1.2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Terselenggaranya pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp 301.680.000	Rp 89.784.348	30%	1	Unit	1	Unit	100 %	Tercapai
6	<b>PROGRAM</b>	Meningkatnya penanganan	Persentase Limbah B3 yang	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>	%	<b>100 (16</b>	%	100	Set blocking (Pengurangan



	<b>PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Terkelola (Persentase)	<b>101.500.000</b>	-		<b>(16 izin</b>		<b>izin</b>		%	anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah)
6.1	<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	Terselenggaranya penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	<b>Rp 101.500.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>0%</b>	<b>1</b>	Doku men	<b>0</b>	Doku men	<b>0%</b>	<b>Anggaran di Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah tetapi target persetujuan teknis</b>
6.1.1	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitas Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 101.500.000	Rp -	0%	<b>1</b>	Doku men	<b>0</b>	Doku men	0%	Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah
7	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang daerah Kab/Kota (%) diterbitkan oleh pemerintah	<b>Rp 1.200.000</b>	<b>Rp 900.000</b>	<b>75%</b>	<b>60</b>	%	<b>66,86</b>	%	111 %	<b>Sangat tercapai</b>
7.1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<b>Rp 1.200.000</b>	<b>Rp 900.000</b>	<b>75%</b>	<b>200</b>	Usaha	<b>208</b>	Usaha	104 %	<b>Sangat tercapai</b>
7.1.1	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Rp 300.000	Rp -	0%	<b>1</b>	Lapora n	<b>1</b>	Lapor an	100 %	berupa cetak laporan (cetak dokumen dan penjiilidan)
7.1.2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang	Jumlah Badan usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi	Rp 900.000	Rp 900.000	100 %	<b>200</b>	Badan Usaha	<b>208</b>	Badan Usaha	104 %	208 Badan Usaha yang kegiatannya diawasi



	Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	diawasi											
8	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	Rp 999.771.510	Rp 566.329.607	57%	95	%	85	%	89%	Sisa anggaran merupakan sisa dari belanja 1. makanan dan minuman lapangan yang seharusnya untuk 1000 orang hanya terealisasi 300 orang. Hal ini disebabkan karena seharusnya jadwal pelaksanaan di bulan Oktober s.d November 2025. Pada bulan November adanya bencana alam daerah yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan 2. Belanja Honorarium Kepanitiaan, Narasumber dan Moderator yang tidak bisa direalisasikan	
8,1	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 999.771.510	Rp 566.329.607	57%	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	<b>Tercapai</b>	
8.1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Rp 244.341.900	Rp 125.527.978	51%	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	<b>Tercapai</b>	
8.1.2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	Rp 755.429.610	Rp 440.801.629	58%	2.250	Orang	1650	Orang	73%	Karena Kegiatan acara HLH yang akan dilaksanakan sedang dalam tahap tanggap darurat bencana alam	
9	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	Rp 96.490.000	Rp 54.826.000	57%	70	%	70	%	100%	Yang tidak teralisasi seluruhnya adalah untuk keperluan kegiatan Pemantauan Adipura (Belanja Honorarium kepanitiaan, Narasumber dan moderator)	
9,1	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Rp 96.490.000	Rp 54.826.000	57%	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100%	Tercapai	



9.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	Rp 96.490.000	Rp 54.826.000	57%	400	Entitas	400	Entitas	100%	Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota dan Provinsi
10	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	Rp 55.070.000	Rp 19.749.765	36%	100	%	113	%	113%	Yang tidak terealisasi adalah anggaran keperluan Pengujian Laboratorium (Emisi Genset dan Kebisingan) karena tidak adanya pengaduan masyarakat terkait pengujian tersebut. Kegiatan Penerapan SA merupakan tindak lanjut dr kegiatan pengawasan dan pengaduan, setelah verifikasi lapangan pengawasan/pengaduan sebelum di SA terlebih dahulu disampaikan surat penyampaian hasil pengawasan yg berisi temuan dan perintah kpd objek usaha/kegiatan. Ketika Surat tsb sudah ditindaklanjuti, maka tdk di jatuhkan SA, namun ketika sampai batas waktu yg ditentukan usaha/keg tidak menindaklanjuti maka di jatuhi SA.
10,1	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	Terselenggaranya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp 55.070.000	Rp 19.749.765	36%	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100%	Tercapai
10.1.1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	Rp 54.170.000	Rp 18.849.765	35%	50	Pengaduan	111	Pengaduan	222%	Sudah sebanyak 77 Pengaduan terkait Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan yang telah ditangani/ ditindaklanjuti
10.1.2	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Rp 900.000	Rp 900.000	100%	50	perkara	22	perkara	44%	Hanya 22 perkara yang dikenakan sanksi



11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	Rp 2.081.532.120	Rp 867.229.410	42%	68	%	68,63	%	101%	Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah : Anggaran realisasi kinerja tercapai
11.1	<b>Pengelolaan Sampah</b>	Terselenggaranya Pengelolaan sampah	Persentase jumlah pengelolaan sampah	Rp 2.081.532.120	Rp 867.229.410	42%	15,1	%	25,03	%	166%	<b>Sangat tercapai</b>
11.1.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Rp 839.084.320	Rp 149.329.410	18%	10	kelompok	10	kelompok	100%	Pelatihan Pengelolaan Sampah Penilaian Kebersihan PKK Tingkat kelurahan Peringatan Hari Bumi Sosialisasi di bantaran sungai Sosialisasi Kebersihan kepada Penggiat Sampah
11.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Rp 959.979.800	Rp 717.900.000	75%	4	dokumen	4	dokumen	100%	Pengadaan :- Blanko rekening sampah- Dust Bin- Tong sampah komunal- Tong sampah terpilih
11.1.3	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Rp 1.200.000	Rp -	0%	95,92 2,04	Ton	159.013,62	ton	166%	Tercapai
11.1.4	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Rp 281.268.000	Rp -	0%	1	laporan	0	laporan	0%	Pengurangan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah : Sebanyak 45 Kelompok yang terlibat aktif dalam Pengelolaan Sampah, baik dari Penilaian Kebersihan PKK Tingkat Kelurahan, Sosialisasi Kebersihan di media Online maupun pada Papan Baliho dan Billboard
<b>Total</b>				Rp 71.821.509.958	Rp 55.214.740.659	76,8 8%					108, 64%	



**TABEL 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d**  
**Tahun 2025**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2025 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
				(n- 2)				s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2025 n-1 (TW IV)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)</b>	<b>100%</b>	<b>70%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>100%</b>
PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/ Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	4 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>0%</b>
PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Persentase RTH (Persentase)</b>	<b>5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,73%</b>	<b>6,73%</b>	<b>100%</b>
	<b>Indeks kualitas tutupan lahan</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>30,27</b>	<b>30,27</b>	<b>100%</b>			
<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola dengan baik</b>	<b>2 Ha</b>	<b>2 Ha</b>	<b>5 Hektar</b>	<b>5 Hektar</b>				



	<b>Jumlah dokumen Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Ha	3 Ha	5 Hektar	5 Hektar	100%	3 Ha	3 Ha	100%
PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten /Kota	2 Unit	0	3 Unit	3 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)</b>	<b>93,52%</b>	<b>100%</b>	<b>65%</b>	<b>50%</b>	<b>77%</b>	<b>93,44</b>	<b>96,34</b>	<b>103%</b>
<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah dokumen pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>65%</b>	50%	77%	4 Dokumen	4 Dokumen	<b>100%</b>
PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIK SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1 Dokumen	0	9 Dokumen	5 Dokumen	56%	10 Dokumen	4 Dokumen	40%
PEMBANGUNAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS yang dibangun	1420 Ton/Hari	0	1.259 Ton/Hari	984.390 Ton/Hari	78%	1300 Ton/Hari	1615 Ton/Hari	124%
OPTIMALISASI TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	3 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
PENINGKATAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	1420 Ton/Hari	0	1.259 Ton/Hari	984.390 Ton/Hari	78%	1300 Ton/Hari	1615 Ton/Hari	124%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)</b>	<b>68,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>68,63</b>	<b>101%</b>
<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Timbulan sampah yang terkelola</b>	<b>0%</b>		<b>72%</b>	<b>60%</b>	<b>83%</b>			
	<b>Persentase jumlah pengelolaan sampah</b>	<b>26 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>15%</b>	<b>25,03%</b>	<b>165,8%</b>
PENINGKATAN PERAN SERTA	Jumlah Masyarakat, Kelompok	10	3	85	45	53%	10	10	100%



MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	Kelompok	Kelompok	Kelompok		Kelompok	Kelompok	
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	1	1	1	1	100%	4	4	100%
		Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	
PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DI INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, PUSAT PENGOMPOSAN, BIODIGESTER, BANK SAMPAH DAN FASILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	24 Ton	0	547000 Ton	467072 Ton	85%	95.922,04 Ton	159.013,62 Ton	166%
PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMBATAHAN TIMBULAN SAMPAH	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	1	0	1	1	100%	1 Laporam	0 Laporan	0%
		Laporan		Laporan	Laporan				
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan</b>	<b>0%</b>	<b>70%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>			
	<b>Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>100%</b>	1 Dokumen	0 Dokumen	<b>0%</b>



FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	1	1	100%	1	0	0%
		Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)</b>	<b>72%</b>	<b>70%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>	<b>66,85%</b>	<b>111%</b>
<b>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>255 Kelompok</b>	<b>70%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>200 Usaha</b>	<b>208 Usaha</b>	<b>104%</b>
FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	40	143	100	100	100%	1	1	100%
		Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Laporan	Laporan	
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	215	0	200	217	109%	200	208	104%
		Badan		Badan	Badan		Badan	Badan	
		Usaha		Usaha	Usaha		Usaha	Usaha	
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)</b>	<b>100%</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>113%</b>	<b>113%</b>
<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan &amp; Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota</b>	<b>Persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
	<b>Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>100%</b>



PENGELOLAAN PERMASALAHAN DAN PERUSAKAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA	PENGADUAN PENCEMARAN LINGKUNGAN	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	50		50	98		50	111	
			Pengaduan	0	Pengaduan	Pengaduan	196%	Pengaduan	Pengaduan	222%
PENERAPAN ADMINISTRASI KEWENANGAN KOTA	SANKSI YANG MENJADI KABUPATEN/ KOTA	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	50 Perkara	0	0	0	0%	50 Perkara	22 Perkara	44%
<b>PROGRAM PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>PENGENDALIAN DAN/ATAU LINGKUNGAN</b>	<b>Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup</b>	<b>0</b>	<b>25.10 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
		<b>Indeks Kualitas Air (Indeks)</b>	<b>54,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,22</b>	<b>74,56</b>	<b>138%</b>
		<b>Indeks Kualitas Udara (Indeks)</b>	<b>81,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,49</b>	<b>75,91</b>	<b>94%</b>
<b>Pencegahan dan/atau Kerusakan LH Kabupaten/Kota</b>	<b>Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>
			<b>Dokumen</b>	<b>Laporan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>Dokumen</b>		<b>Dokumen</b>	<b>Dokumen</b>	
KOORDINASI, DAN PENCEGAHAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	SINKRONISASI, PELAKSANAAN PENCEMARAN HIDUP TERHADAP	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	7	9	6	6	100%	7	6	86%
			Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	SINKRONISASI, PELAKSANAAN PENCEMARAN HIDUP TERHADAP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3	4	3	3	100%	5	3	60%
			Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	LABORATORIUM HIDUP	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	3	4	2	2	100%	3	2	67%
			Dokumen		Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	
<b>Penanggulangan dan/atau Kerusakan LH Kab/ Kota</b>	<b>Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/ Kota</b>	<b>persentase pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>			
		<b>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>100%</b>
PEMBERIAN	INFORMASI	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi	2	3	2	0	0%	1	1	100%



PERINGATAN DAN/ATAU LINGKUNGAN MASYARAKAT	PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN HIDUP PADA	Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan		Laporan	Laporan	
<b>Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan</b>		<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>			
	<b>Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>		<b>2 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>100%</b>
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGHENTIAN SUMBER PENCEMARAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan		2	1	20	45		1	4	400%
		Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)</b>		<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>85%</b>	<b>89%</b>
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	100%	<b>1</b>	<b>1</b>	100%
		Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	Kegiatan	
PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		5	1	5	5	100%	1	1	100%
		Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	
PENYELENGGARAAN PENYULUHAN DAN KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat		2250	2250	1500	1500	100%	2250	1650	73%
		Orang	Orang	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)</b>		<b>80%</b>	<b>70%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			400 Entitas	750 Entitas	840 Entitas	112%			
		Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	<b>4 Kegiatan</b>					<b>4 Kegiatan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>100%</b>
PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/ DUNIA PENDIDIKAN/ FILANTROPI	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		400	400	750	840	112%	400	400	100%
		Entitas	Entitas	Entitas	Entitas	Entitas		Entitas	Entitas	



DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP									
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)</b>	<b>BB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>100%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>20 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 Dokumen</b>	<b>15 Dokumen</b>	<b>100%</b>
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>26 Laporan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>26 Dokumen</b>	<b>26Dokumen</b>	<b>100%</b>
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/ Bulan	124 Orang/ Bulan	135 Orang/ Bulan	135 Orang/ Bulan	100%	128 Orang/ Bulan	135 Orang/ Bulan	105%
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	0	0	0	0%	0	0	0%
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	0	0	0	0%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>			
	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	2 Dokumen	<b>0</b>	<b>0%</b>
PENGADAAN PAKAIAN DINAS	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	3	0	2	0	0%	0	0	0%



BESERTA KELENGKAPANNYA	ATRIBUT	Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	Paket		Paket	Paket	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 orang	0	0	0	0%	0	0	0%
BIMBINGAN TEKNIK IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implemenasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	20 Orang	20 Orang	0 Orang	0%	0	0	0%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>					
	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>9 Dokumen</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>88%</b>
PENYEDIAAN INSTALASI PENERANGAN KANTOR	KOMPONEN LISTRIK/BANGUNAN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket	Paket	
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	1	1	100%	2	1	50%
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket	Paket	
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	2	1	1	100%	1	1	100%
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket	Paket	
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	5	5	5	100%	6	4	67%
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket	Paket	
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	5	2	2	100%	3	3	100%
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket	Paket	
PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4	6	4	1	25%	0	0	0%
			Paket	Paket	Paket	Paket		Paket	Paket	
FASILITASI KUNJUNGAN TAMU		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	40	45	45	100%	50	90	180%
			Laporan	Laporan	Laporan	Laporan		Laporan	Laporan	
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	150	150	150	100%	150	150	100%
			Laporan	Laporan	Laporan	Laporan		Laporan	Laporan	
DUKUNGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	PELAKSANAAN	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	1	100%	1	1	100%
			Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	



<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>			
	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>14 Unit</b>	<b>13 Unit</b>	<b>93%</b>
PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	0	97	1	1%	3	3	100%
		Unit		Unit	Unit		Unit		
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28	4	56	56	100%	10	19	190%
		Unit	Unit	Unit	Unit		Unit	Unit	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
	<b>Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>100%</b>
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	1	1	1	100%	1	1	100%
		Laporan	Laporan	Laporan	Laporan		Laporan	Laporan	
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	1	3	3	100%	3	3	100%
		Laporan	Laporan	Laporan	Laporan		Laporan	Laporan	
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	13	13	11	85%	13	13	100%
		Laporan	Laporan	Laporan	Laporan		Laporan	Laporan	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>85%</b>	<b>0%</b>			
	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>290 Unit</b>	<b>212 Unit</b>	<b>73%</b>
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	51	76	25	33%	45	27	60%
		Unit	Unit	Unit	Unit		Unit	Unit	
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200	120	71	70	99%	160	100	63%
		Unit	Unit	Unit	Unit		Unit	Unit	
PEMELIHARAAN/REHABILITASI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	3	3	2	1	50%	3	3	100%



GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	Unit	Unit		Unit	Unit	
PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	82	5	77	77	100%	82	82	100%
		Unit	Unit	Unit	Unit		Unit	Unit	
<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Persentase Cakupan Penataan Organisasi</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
	<b>Jumlah Dokumen Penataan Organisasi</b>	<b>40 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 Dokumen</b>	<b>20 Dokumen</b>	<b>50%</b>
PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	40	40	40	40	100%	40	20	50%
		Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen		Dokumen	Dokumen	



**TABEL 2.3 (TC.30)**  
**Pencapaian Kinerja dan Realisasi Tujuan, Sasaran Renstra**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**

No.	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						Realisasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup secara Terkendali dan Partisipatif	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	63,69	63,7	63,71	63,72	63,73	63,74	63,75	67,68
2	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	32,5	60	63	66	69	72	75	66,8
3	Meningkatnya Tatakelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	-	68	68,2	68,4	68,6	68,8	69	68,63
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	B



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Medan dengan tugas melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Kota Medan. Secara garis besar, fungsi strategis yang diemban adalah untuk memfasilitasi tujuan pembangunan berkelanjutan dan disesuaikan dengan amanat Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Medan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

1. Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kelestarian lingkungan hidup, baik untuk saat sekarang ini dan kelangsungannya dimasa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan ini mengisyaratkan kepada keseimbangan dalam aspek sosial, aspek lingkungan hidup dan aspek ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Medan.
2. Akan tetapi pada kenyataannya penurunan kualitas lingkungan masih terus terjadi, antara lain disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, limbah domestik yang belum dikelola dengan baik; pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor), sumber tidak bergerak dari cerobong asap pabrik ; akses terhadap Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Periode Tahun 2025 – 2029 informasi tentang lingkungan hidup yang belum dimanfaatkan dan ditindaklanjuti



secara optimal.

3. Kondisi lingkungan seperti saat ini tidak dapat dipungkiri merupakan dampak dari meningkatnya kegiatan pembangunan dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan serta program-program pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Kegiatan pembangunan dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan serta program-program pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan.
4. Pada laporan Ranwal Rencana Kerja Tahun 2027 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, pada tabel T-C.30 menyampaikan data capaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Khusus untuk tahun 2025, realisasi target yang dipergunakan adalah realisasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2025. Kemudian pada Realisasi 2029 mempergunakan angka target. Pencapaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.3 dengan format tabel T-C.30. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa seluruh indikator sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat tercapai. Tetap perlu dilakukan manajemen pengelolaan program dan kegiatan yang lebih baik dan terkontrol sehingga target kinerja dapat direalisasikan capaiannya lebih cepat. Secara umum, pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dapat dilihat pada tabel 2.2.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup
  - A. Penyelenggaraan SAKIP dimana tahun 2025 nilai SAKIP **Dinas Lingkungan Hidup berada pada posisi B.**
  - B. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien dimana jumlah lokasi yang dipantau kualitas udara ambiennya di tiga titik lokasi meliputi Rusunawa Kayu Putih Medan (Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli), Jalan Pinang Baris No. 114 (kawasan



Dinas Lingkungan Hidup), dan Jl. A.H Nasution (kawasan BRIDA). **Data pengujian parameter kualitas lingkungan menggunakan 7 parameter yakni PM10, PM 2.5, NO2, SO2, CO, O3 dan HC. Hasil perhitungan kualitas udara disampaikan kepada public paling sedikit 2 kali dalam 1 hari, yaitu pada pukul 09.00 dan 15.00.**

C. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. **Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup Kota Medan meliputi:**

- 1. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Kota Medan**
- 2. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) oleh Komisi Penilai AMDAL Kota Medan.**

D. Pelayanan Penaatan Lingkungan Sekolah

Pelayanan Penaatan Lingkungan diarahkan kepada peningkatan kualitas lingkungan sekolah. Dalam hal ini Kepala Sekolah menerapkan sistem manajemen yang terkait mutu lingkungan sekolah termasuk peningkatan kesadaran guru dan murid kepada pelestarian lingkungan. **Untuk pendampingan sekolah adiwiyata pada tahun tahun 2020 sebanyak 50 sekolah tahun 2021 50 sekolah, 2022 sebanyak 200 sekolah, tahun 2024 sebanyak 123 sekolah yang akan maju sebagai calon sekolah Adiwiyata Tingkat Kota.**

E. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD). Pengawasan Lingkungan Hidup bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan



hidup juga kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum dalam izin lingkungan/Dokumen Lingkungan (AMDAL) atau UKL/UPL. Sasaran pengawasan lingkungan hidup adalah mendapatkan data dan informasi berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan/atau kegiatan lingkungan serta perizinan yang terkait. Jumlah perusahaan yang diawasi pada tahun **2024 sebanyak 200 Perusahaan, jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi tahun 2024 sebanyak 3 dokumen.**

- E. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL-AMDAL/UKL-UPL) dan Izin Lingkungan Rekomendasi yang difasilitasi ini merupakan rekomendasi terhadap dokumen lingkungan dan merupakan kewajiban di dalam tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan yang berfungsi sekaligus sebagai persyaratan mengurus izin lingkungan. **Jumlah rekomendasi perizinan lingkungan hidup yang diterbitkan terdiri dari izin Dokumen AMDAL, UKL-UPL/SPPL di tahun 2024 sebanyak 100 rekom. Dokumen AMDAL yang telah diterbitkan tahun 2024 sebanyak 4 dokumen. Dokumen UKL/UPL yang telah diterbitkan tahun 2023 sebanyak 21 dokumen.**

- F. Pelayanan Pengelolaan Limbah B3 (Penyimpanan Sementara Limbah B3)

Salah satu kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dari usaha/ kegiatan di Kota Medan adalah memiliki Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS Limbah B3). Kewajiban pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Kementrian KLH Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tatacara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3. Untuk menjamin pengelolaan limbah B3 yang aman, sesuai



standar, dan melindungi kesehatan masyarakat serta lingkungan Pemko Medan telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2016 adalah tentang **Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum terkait pengelolaan limbah B3, yang mencakup ketentuan umum, maksud tujuan, hingga sanksi bagi pelanggarnya. **Data pengelolaan limbah B3 dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan pengolahan, dan/atau penimbunan kewenangan provinsi Kota Medan tahun 2024 sebanyak 1 dokumen.**

G. Pelayanan Persampahan

Pelayanan persampahan/kebersihan belum menjangkau seluruh daerah Kota Medan. Disamping itu, juga dikarenakan adanya sebagian warga Kota Medan yang tidak mau membayar retribusi sampahnya. Hal yang lain juga ikut andil sebagai penyebab penurunan Retribusi Pelayanan Persampahan adalah jumlah WRS yang masih sedikit. Target tahun 2024 mengalami kenaikan WRS sebesar 17,5% terealisasi 31,18%. Total WRS Desember akhir 2023 sebanyak 102.063 WRS sedangkan akhir Desember 2024 sebanyak 133.886 WRS.

H. Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/Kota

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, indikator ini mengukur kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam indeks kualitas lingkungan. **Target untuk 2024 adalah 58,05 poin, dengan pencapaian yang cenderung stabil pada 57,82 poin pada tahun 2023 dan 58,05 poin pada 2024. Capaian rata-rata untuk 2021- 2024 adalah 92,07%, mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup berjalan baik.**

I. Pelayanan Penyediaan Informasi tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Resiko Lingkungan, Jasa Lingkungan (Jasa Ekosistem, PDRB Hijau), Kerentanan



Keanekearagaman Hayati serta Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Pelayanan penyediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksudkan agar seluruh Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap Kebijakan, Rencana dan Program ataupun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan memiliki panduan yang baku dan seragam. Resiko lingkungan merupakan informasi yang harus disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan agar setiap kegiatan/usaha mengetahui antisipasi yang harus dilakukan. Jasa lingkungan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelestarian lingkungan dan mendapat kompensasi terhadap jasa tersebut.

**Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota tahun 2024 sebanyak 3 dokumen.**

Pelayanan informasi keanekaragaman hayati dan perubahan iklim merupakan hal yang penting dalam menyikapi penurunan ketahanan pangan, punahnya spesies, dan mitigasi /adaptasi perubahan iklim. Pelayanan Penyediaan Dokumen RPPLH, Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Pelayanan Penyediaan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan terhadap arah pembangunan berkelanjutan. Penyediaan baku mutu lingkungan adalah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk mengevaluasi status mutu kualitas Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan mencegah terjadinya pencemaran yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, **Dokumen muatan dan target RPPLH untuk tahun 2024 telah disusun sebanyak 2 dokumen.**

J. Pelayanan Penyediaan Jasa Teknis (Pelatihan/Pembinaan, Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup kepada Kabupaten/Kota)

Pelayanan ini diberikan dalam rangka meningkatkan wawasan,



kesadaran dan kapasitas serta komitmen masyarakat secara formal dan informal termasuk penerapan kriteria untuk memperoleh penghargaan di bidang lingkungan hidup. Perolehan penghargaan di bidang lingkungan hidup antara lain : Penghargaan Lima Besar Kepala Dinas Lingkungan Hidup terbaik se Indonesia Tahun 2023.

Pelayanan Penyediaan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasinta Tantra) yang sebelumnya dikenal dengan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) berlandaskan hukum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 62 ayat (2) yang mewajibkan pemerintah baik Nasional maupun kabupaten/kota untuk menyebar luaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat.

**Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan tahun 2024 sebanyak 45 kelompok.**

K. Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Berdasarkan konvensi perubahan iklim, Indonesia memiliki kewajiban penurunan emisi gas rumah kaca dengan target **31,89% (upaya domestik) hingga 43,20% (dengan dukungan internasional)** pada tahun 2030. Oleh sebab itu Indonesia memiliki beberapa upaya untuk pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca diantaranya perlindungan pemulihan terhadap gambut, rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan bio diesel Kc 100, proyek panel surya dan energi. Target Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam penurunan emisi gas rumah kaca 2,77 % di tahun 2021 dan meningkat menjadi 16,11% sampai dengan tahun 2026. Upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai penurunan emisi gas rumah kaca diantaranya penggunaan energi ramah lingkungan seperti panel surya.



**Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/perubahan iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota tahun 2024 sebanyak 3 dokumen**



**TABEL 2.4**  
**DATA STATISTIK SEKTORAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN TAHUN**  
**2025**

No	Uraian DSSD	Satuan	2022	2023	2024
1	Kapasitas perencanaan TPA	Ton/Hari			0
2	Kapasitas TPA terpakai	Ton/Hari			0
3	Fasilitas penunjang TPA	Ton/Hari			1
4	Kapasitas perencanaan TPST	Ton/Hari			0
5	Kapasitas TPST terpakai	Ton/Hari			0
6	Kapasitas perencanaan SPA	Ton/Hari			0
7	Kapasitas SPA terpakai	Ton/Hari			0
8	Kapasitas perencanaan TPS3R	Ton/Hari			0
9	Kapasitas TPS3R terpakai	Ton/Hari			0
10	Jumlah KK terlayani	Ton/Hari			
11	Kapasitas perencanaan TPA	Ton/Hari			0
12	Kapasitas TPA terpakai	Ton/Hari			0
13	Fasilitas penunjang TPA	Paket			1
14	Kapasitas perencanaan TPST	Ton/Hari			0
15	Kapasitas TPST terpakai	Ton/Hari			0
16	Kapasitas perencanaan SPA	Ton/Hari			0
17	Kapasitas SPA terpakai	Ton/Hari			0
18	Kapasitas perencanaan TPS3R	Ton/Hari			0
19	Kapasitas TPS3R terpakai	Ton/Hari			0
20	Kapasitas TPS	Ton/Hari			0
21	Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Persampahan	Dokumen			1
22	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan	Dokumen	0	0	1
23	Jumlah Dokumen rencana teknis rinci TPA, TPST, SPA, TPS-3R, TPS	Dokumen	8	1	1
24	Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Persampahan	Dokumen	0	0	0
25	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST	Dokumen			0
26	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST	Dokumen			0
27	Jumlah Dokumen Jakstrada Persampahan	Dokumen			1
28	Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	1
29	Jumlah Dokumen Hasil Analisis/ Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	-	-	-
30	Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1	Laporan	NA	NA	NA
31	Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	6	12	4
32	Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	6	20	21
33	ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1	Izin	49	61	31
34	Nilai IKA n-1	poin	68,36	61,97	62,78
35	Nilai IKAL n-1	poin	24,91	28,74	34,41
36	Nilai IKLH n-1	poin	61,89	63,67	63,69



37	Nilai IKTL n-1	poin	24,91	28,74	34,41
38	Nilai IKU n-1	poin	75,88	84,15	80,38
39	Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1	persetujuan	12	34	29
40	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	5	5	6
41	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1
42	Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/ Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor	Dokumen	1	1	1
43	Lokasi Proklamasi yang berada di wilayah kabupaten/kota	Lokasi	5	4	4
44	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/ Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1
45	Data contoh uji	Data		9	16
46	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	5	5	5
47	Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	7	7	7
48	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat	Publikasi	-	-	-
49	Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat	Dokumen	3	3	-
50	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota	Dokumen	82	31	45
51	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	0	5916	7250
52	RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	0	0	98
53	Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	0	0	0
54	Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	0	0	0
55	Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	Dokumen	-	-	-
56	Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dokumen	-	-	-
57	Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	-	-	-
58	Permohonan kelayakan lingkungan hidup	Dokumen	-	-	-



59	Persetujuan lingkungan hidup	Dokumen	12	34	29
60	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	205	171	217
61	Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	12	34	40
62	Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota	Dokumen	38	34	31
63	Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	Usaha/ Kegiatan	25	48	80
64	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin			31
65	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	12	34	31
66	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	285	321	275
67	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1
68	Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	1
69	Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	-	4	4
70	Laporan hasil Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota	Dokumen	1	1	1
71	Masyarakat/kelompok Masyarakat/ pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Orang	-	900	1500
72	Masyarakat/lembaga Masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	-	200	840
73	Masyarakat/lembaga Masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Entitas	200	330	840
74	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	25	48	99
75	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ ditangani	Aduan	25	48	99
76	Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	25	48	99
77	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	25	48	99
78	Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	1	1	1



79	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	1	1	1
80	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	18	45	48
81	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya	Sanksi			80
82	Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah	Kelompok	29	31	31
83	Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir	Kelompok	29	31	31
84	Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan	Kelompok	28	28	45
85	Timbulan Sampah Harian	Ton	1.722,60	1.768,94	1.731,92
86	Timbulan Sampah Tahunan	Ton	628.749,22	645.661,28	633.881,33
87	Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dokumen	-	-	-
88	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dokumen	-	-	-
89	Timbulan Sampah Harian	Ton	1.722,60	1.768,94	1.731,92
90	Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan	Ton	310.225	486.506	506.479,11
91	Volume timbulan sampah yang diolah	Ton	24.994	93.996	93.545,46
92	Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya	Ton	310.225	486.506	506.479,11
93	Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya	Ton			506.479,11
94	Kegiatan pengurangan sampah	Kegiatan	1	1	1
95	Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Ton	25.527	96.000	95.451,46
96	Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan	1	1	1

## 2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

### 2.4.1 Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, maka dijumpai sejumlah permasalahan yang ada dilapangan dan harus dilakukan sejumlah



upaya/pendekatan dalam penyelesaian/penuntasan berbagai permasalahan tersebut.

Berikut gambaran permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan :

**1. Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan** meliputi :

- a. Masih banyak penduduk dan badan usaha yang membuang limbah rumah tangga dan limbah usaha ke sungai.
- b. Peningkatan pelepasan atau pembuangan Emisi GRK menyebabkan Pemanasan global, suhu rata-rata di Kota Medan mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- c. Emisi gas buang di jalan raya, daerah industri dan sampah di TPA berbahaya bagi kesehatan penduduk.
- d. Minimnya kepemilikan luas Taman Keanekaragaman Hayati yang menjadi Tupoksi Dinas.
- e. Terdapat pencemaran air udara dan tanah di sekitar lokasi TPA (disebabkan tidak adanya jalur hijau atau Barrier pemisah antara TPA dan tanah masyarakat) sehingga tanah masyarakat di lokasi TPA tidak baik untuk peruntukan perumahan atau usaha.
- f. Belum optimalnya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Medan, meskipun secara umum IKLH di Kota Medan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, laju pertumbuhan IKLH masih relatif lambat.

**2. Rendahnya kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan :**

- a. Tingginya pelanggaran ijin oleh Pelaku Usaha
- b. Instrumen lingkungan seperti SPPL, UKL-UPL/DPLH, dan AMDA/DELH terkait kegiatan usaha ramah lingkungan ramah lingkungan belum maksimal

**3. Kualitas Penanganan dan Pengurangan Sampah**

- Belum optimalnya pengangkutan sampah di Kota Medan.
- Belum Optimalnya Pengelolaan dan pengurangan sampah baik di TPA/TPS/TPST maupun ditingkat rumah tangga (pengelolaan sampah system 3R).
- Teknologi pengelolaan sampah masih rendah



- Kurangnya keterlibatan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah
- Pemahaman terhadap teknologi pengelolaan sampah masih rendah
- Masyarakat belum terbudaya melakukan pengelolaan sampah sistem 3R
- Pola pembinaan terhadap masyarakat masih kurang
- Masyarakat belum melihat sampah memiliki peluang ekonomi yang bisa membawa keuntungan bila dimanfaatkan dengan baik.
- Daya tampung dan daya dukung TPA yang semakin terbatas
- Belum tersebar luasnya kepada seluruh masyarakat mengenai PERDA Pengelolaan Persampahan
- Masih lemahnya penegakkan aturan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan
- Sudah ada pihak masyarakat atau swasta yang memproses sampahnya sendiri baik melalui bank sampah, dll, tapi komunikasi masih lemah sehingga tidak tersedia data bulanan berapa kapasitas sampah yang sudah mereka olah.
- Masih sedikitnya kerjasama dengan pihak swasta untuk memanfaatkan sampah
- Jumlah WRS yang Belum optimal
- Terbatasnya TPS 3R, dan Bank Sampah
- Rendahnya Daur Ulang & tingginya penggunaan sampah sekali pakai
- Pemahaman terhadap teknologi pengelolaan sampah masih rendah diantaranya :
  - ✓ Belum tersosialisasinya MRF (material recovery facility) yang dapat menggantikan banyak fungsi TPS dan TPS3R
  - ✓ Belum tersosialisasi dan belum dilaksanakan secara luas teknologi bio konversi
  - ✓ Belum dilaksanakannya secara luas pemanfaatan hasil sampah seperti kompos dan biogas.



- ✓ Belum tersosialisasi pengolahan sampah menggunakan RDF (refuse derived fuel) yang bisa memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.

4. Terbatasnya Kapasitas SDM dan masih rendahnya pengembangan sistem informasi teknologi yang terintegrasi terkait pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan hidup :

- Kurangnya jumlah dan kapasitas SDM terkait akuntabilitas kinerja, ahli perencanaan teknis, ahli analisis teknis laboratorium, iklim, GIS, pengawasan dan pengendalian
- Tidak maksimalnya penggunaan system Informasi Teknologi untuk terkait pendataan, WRS, penanganan sampah dan pencemaran.

#### **2.4.2 Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Permasalahan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dikerucutkan menjadi Isu-isu strategis yang akan dipecahkan dan melalui program kegiatan sub kegiatan dan inovasi selama 5 tahun. Adapun isu strategis yang diidentifikasi terkait lingkungan hidup adalah sebagaimana berikut :

1. Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
2. Belum optimalnya kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan;
3. Belum optimalnya kualitas penanganan dan pengurangan sampah;
4. Terbatasnya Kapasitas SDM dan masih rendahnya pengembangan system Informasi Teknologi yang terintegrasi



**TABEL 2.5**  
**Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**

POTENSI DAERAH YG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DGN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Timbulan sampah yg di tangani (daur ulang, digunakan kembali dll)	Pengelolaan Sampah Belum Optimal	Proyeksi timbulan sampah, produksi lumpur tinja, air limbah yang dihasilkan,	Pencemaran air, udara dan tanah, Tingginya sampah domestik tidak terkelola	Sistem pelayanan persampahan (Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengharuskan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada)	1. Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah dan limbah	1. Belum optimalnya kualitas penanganan dan penguangan sampah
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku, manajemen Pengelolaan sampah dan Limbah	Degradasi LH (bencana hidro meteorologis, kuantitas dan kualitas air, air tanah, pencemaran udara)					1. Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan; 2. Belum optimalnya kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan;
Pengurangan Risiko Bencana	Berkurangnya Daerah Resapan Air Akibat Meningkatnya Lahan Terbangun	Memiliki kerawanan banjir bandang tinggi, memiliki kerawanan kebakaran hutan dan lahan	Peningkatan Intensitas Bencana Hidrometeorologi (banjir, long sor, kekeri ngan, dll)	Polusi dan Kerusakan Lingkungan	2. Pengu rangan resiko bencana	1. Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
Adaptasi Perubahan Iklim,	Peningkatan Risiko Iklim	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Peningkatan Gas Emisi Rumah Kaca (GRK)	pengendalian pencemaran udara, sumber pencemaran udara	3. Adaptasi perubahan iklim	
Pemanfaatan keanekaragaman hayati	Alih fungsi pemanfaatan lahan (bantaran sungai, mangrove, RTH)	Terdapat ketidak sesuaian antara penutupan lahan dengan rencana pola ruang pada RTRW Kota Medan	Hilangnya Keanekaragaman Hayati	Rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya keaneka ragaman hayati bagi kehidupan	4. Minimnya ruang terbuka hijau;	1. Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;



## **2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam RKPD Tahun 2027, terhadap sejumlah kebutuhan yang telah direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Kebutuhan OPD tersebut dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan OPD. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan. Pada tabel T-C.31 ini disajikan rancangan awal RKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk tahun 2027 sebagai berikut ini :



**TABEL 2.6 (TC.31)**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2027 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN**

No	Rancangan Awal RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan 2027					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	<b>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	93,48%	3.443.905.152	<b>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	93,48%	4.369.895.388	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	4	3.443.905.152	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	4	4.369.895.388	
2	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	B	61.283.107.140	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	BB	128.311.183.792	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	5.400.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	524.880.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26	23.070.915.403	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26	44.016.166.127	



	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23	4.388.594.122	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23	5.868.992.059	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314	8.785.376.234	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314	11.413.723.481	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	811.890.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	974.268.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	9	16.272.409.307	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	9	24.867.304.378	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	7.854.122.074	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	40.442.569.747	
	Penataan Organisasi		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	40	94.400.000	Penataan Organisasi		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	40	203.280.000	
3	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100%	397.274.006	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100%	476.728.807	



	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	4 Dokumen	199.512.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota		jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	4 Dokumen	239.414.400	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1 Dokumen	197.762.006	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1 Dokumen	237.314.407	
4	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Indeks Kualitas Air (Indeks)	54,31%	2.299.723.763	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Indeks Kualitas Air (Indeks)	54,31%	2.824.888.516	
			Indeks Kualitas Udara (Indeks)	80,44%				Indeks Kualitas Udara (Indeks)	80,44%		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	13 Dokumen	2.297.887.763	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	13 Dokumen	2.822.685.316	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2 Dokumen	918.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2 Dokumen	1.101.600	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1 Dokumen	918.000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.101.600	



5	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase RTH (Persentase)	0,03546	578.197.200	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase RTH (Persentase)	0,03546	30.596.960.090
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2	578.197.200	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2	30.596.960.090
6	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100%	103.530.000	<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100%	124.236.000
	Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	1 Dokumen	103.530.000	Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	1 Dokumen	124.236.000
7	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	66	1.224.000	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	66%	1.468.800



	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	245	1.224.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	245	1.468.800	
8	<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan	90%	1.019.766.940	<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan	90%	1.223.720.328	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	1.019.766.940	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	1.223.720.328	
9	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	70%	98.419.800	<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	70%	487.170.246	



	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	400	98.419.800	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	400	487.170.246	
10	<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100%	56.171.400	<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100%	193.908.456	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2	56.171.400	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2	193.908.456		
11	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	68,4	2.186.520.756	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	Seluruh Kelurahan dan Kecamatan Kota Medan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	68,4	2.625.346.650	
	Pengelolaan Sampah		Jumlah dokumen Pengelolaan sampah	3 Dokumen	2.186.520.756	Pengelolaan Sampah		Jumlah dokumen Pengelolaan sampah	3 Dokumen	2.625.346.650	
	Total				71.467.840.157					171.235.507.073	



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan nasional merupakan upaya komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan pada Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilakukan secara bertahap mulai dengan pembangunan dengan jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang.

Presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming telah menetapkan visi untuk periode 2024-2029, yaitu “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**” dan misi yang dikenal sebagai “Asta Cita”. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden , maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) (KLH) yaitu:

***“Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045 “.***

Arti lestari dalam visi KLH/BPLH di atas merujuk pada kemampuan untuk mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan, memastikan keseimbangan ekologis tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memiliki misi sebagai berikut:

- Mewujudkan Perencanaan Lingkungan Hidup yang Efektif
- Mewujudkan Ekonomi Hijau melalui Pengendalian Lingkungan Hidup yang Inklusif dan Partisipatif
- Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang Kuat dan Adil
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang baik



Sasaran strategis untuk mewujudkan kelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), yaitu:

1. Meningkatnya kebijakan perencanaan lingkungan hidup yg andal
2. Meningkatnya ekonomi hijau dan kapasitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim
3. Menguatnya penegakan lingkungan hukum hidup bersama lintas sektor
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak.

Presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming telah menetapkan visi dan misi untuk periode 2024-2029, yang dikenal sebagai “Asta Cita” dan didukung oleh 17 program prioritas.

### **3.1.1 Bidang Lingkungan Hidup**

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) (KLH) yaitu:

***“Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045 “.***

Arti lestari dalam visi KLH/BPLH di atas merujuk pada kemampuan untuk mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan, memastikan keseimbangan ekologis tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memiliki misi sebagai berikut:

- Mewujudkan Perencanaan Lingkungan Hidup yang Efektif
- Mewujudkan Ekonomi Hijau melalui Pengendalian Lingkungan Hidup yang Inklusif dan Partisipatif
- Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang Kuat dan Adil



- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang baik

KLH/BPLH memiliki mandat penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tugas dan fungsinya mencakup seluruh aspek strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan penguatan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia. Sasaran strategis untuk mewujudkan kelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), yaitu:

- Meningkatnya kebijakan perencanaan lingkungan hidup yg andal
- Meningkatnya ekonomi hijau dan kapasitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perubahan iklim
- Menguatnya penegakan lingkungan hukum hidup bersama lintas sektor
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak.

### **3.2 Pemetaan Kebijakan Nasional dan Daerah**

#### **A. Pemetaan 8 Asta Cita Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**

Visi : “ Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi (Asta Cita):

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan



penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

*Dinas Lingkungan Hidup masuk pada astacita ke 2 dan 8, lihat Tabel 3.1*



8 ASTACITA PRESIDEN		TABEL 3.1 DUKUNGAN TERHADAP ASTACITA PRESIDEN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN			
		PROGRAM	INDIKATOR	TARGET / SATUAN Tahun 2027	LOKASI
<b>ASTACITA 2</b>	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	66%	Seluruh Kecamatan
<b>ASTACITA 8</b>	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional</li> <li>Pengelolaan Persampahan</li> <li>Perencanaan lingkungan hidup</li> <li>Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> <li>Pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)</li> <li>Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)</li> <li>Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</li> <li>Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</li> <li>Penanganan pengaduan lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional</li> <li>Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)</li> <li>Persentase rekomendasi kajian lingkungan yang ditindaklanjuti</li> <li>Indeks Kualitas Air</li> <li>Indeks kualitas Udara</li> <li>Persentasi RTH</li> <li>Persentase limbah B3 yang terkelola</li> <li>Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya</li> <li>Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>Persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</li> </ul>	93,48%  68,4 100%  54,31 80,44  6,9%  100%  90%  70%  100%	Kota Medan



## **B. Pemetaan 17 Program Prioritas Nasional Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, pemerintah telah menetapkan 17 program prioritas, antara lain:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia : Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.
18. Program-program ini dirancang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi yang telah



ditetapkan.

*Dinas Lingkungan Hidup masuk ke program prioritas 11, lihat tabel 3..2*

**TABEL 3.2**  
**Dukungan Terhadap 17 Prioritas Nasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**

17 PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET / SATUAN (Tahun 2027)	LOKASI
<b>Program Prioritas 11</b>	Menjamin pelestarian lingkungan hidup	• Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	• Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	66%	Seluruh Kota Medan
		• Perencanaan lingkungan hidup	• Persentase Rekomendasi Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti efektif	100%	
		• Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	• Indeks Kualitas Air	54,31	
		• Pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	• Indeks kualitas Udara	80,44	
			• Persentase RTH	6,9%	

### **C. Pemetaan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**

Delapan program "Hasil Terbaik Cepat" (PHTC) yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan dampak signifikan dalam waktu singkat adalah sebagai berikut :

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan



- sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
  7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.
  8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.
- Program-program ini adalah prioritas yang akan diimplementasikan dengan cepat. Untuk memberikan hasil yang nyata kepada masyarakat. *Dinas Lingkungan Hidup masuk Program Hasil Terbaik Cepat ke 7, lihat tabel 3.3*

**TABEL 3.3**  
**Dukungan Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**

8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC)		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET / SATUAN (Tahun 2027)	LOKASI
<b>Quick Wins 7</b>	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional</li> <li>• Pengelolaan persampahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional</li> <li>• Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)</li> </ul>	93,48%	TPA Terjun dan di Kecamatan Kecamatan
				68,4	

**D. Pemetaan Visi Misi Walikota Medan Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**

**V I S I**

Mewujudkan Medan “BERTUAH” yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data.

Secara akar kata, BERTUAH memiliki makna beruntung, sakti, atau keramat. Di masa lampau, kata ini sering dipakai untuk merujuk kepada keberuntungan yang memiliki suatu objek atau dialami seseorang. Seringnya, keberuntungan tersebut tidak terbatas pada satu aspek saja. Predikat bertuah diatribusi kepada seseorang jika dan hanya jika orang tersebut hidup dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harta



benda yang melimpah, berkedudukan tinggi, berkeluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta setiap langkahnya terhindar dari mara bahaya dan kesialan. Dikarenakan keistimewaan ini, orang-orang berlomba bersahabat dengan sosok bertuah. Pada banyak kasus, sememangnya demikian: dia yang bertuah akan mentransmisi tuahnya kepada orang sekitarnya. Begitupun, tuah bukan tanpa mahar. Dalam persepektif kebudayaan, tuah hanya menghampiri mereka yang berbudi pekerti luhur, yang dengan itu energi-energi positif eksternal tertarik ke dalam diri mereka (*law of attraction*).

### **M I S I**

Menjadikan Medan yang BERBUDAYA

Menjadikan Medan yang ENERGIK

Menjadikan Medan yang RAMAH

Menjadikan Medan yang TERTIB

Menjadikan Medan yang UNGGUL

Menjadikan Medan yang AMAN

Menjadikan Medan yang HUMANIS

*Dinas Lingkungan Hidup masuk pada misi ke 3 Ramah dan Misi ke 7 Aman, lihat table III.4*



RENCANA ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN & RENCANA TARGET KINERJA PEMBANGUNAN	TABEL 3.4 DUKUNGAN TERHADAP VISI MISI WALIKOTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN		
	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET (Tahun 2027)
VISI : MEWUJUDKAN MEDAN "BERTUAH" YANG INKLUSIF, MAJU, DAN BERKELANJUTAN MELALUI SEMANGAT TRANSFORMASI MENUJU MEDAN SATU DATA			
MISI RAMAH : Membangun Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terbaik Berbasis Data, Riset, Dan Inovasi			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang meliputi peningkatan kualitas pelayanan di kantor - kantor pemerintah, berbasis SDM yang melayani, integrasi teknologi informasi, riset dan inovasi serta meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Target Kerja : Menjadikan Kota Medan sebagai Kota dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang ramah dan responsif	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kategori Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang responsif, mudah diakses, transparan, dan berbasis inovasi digital serta penguatan kapasitas SDM	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kategori Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB
MISI TERTIB : Mewujudkan Penataan Kota yang semakin Teratur, Cantik, Rapi, Bersih, dan mendorong Budaya Taat Aturan ditengah-tengah masyarakat			
Mewujudkan penataan kota yang lebih teratur, cantik, rapi, dan bersih, dan mendorong budaya taat aturan di tengah-tengah masyarakat : Meningkatkan penataan ruang kota dan lingkungan hidup yang teratur dan berkelanjutan melalui pemanfaatan lahan secara optimal, mengurangi konflik pemanfaatan ruang, serta mencegah tumbuhnya kawasan kumuh dan tidak tertata. Dengan mengintegrasikan aspek tata ruang dan lingkungan hidup secara harmonis, Kota Medan diarahkan menjadi kota yang tertib, hijau, dan berkelanjutan—tempat yang aman, sehat, dan nyaman untuk ditinggali sekarang dan di masa depan Target Kerja : Menjadikan Kota Medan menjadi Kota yang tertib, nyaman, dan berbudaya taat aturan	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	54,31 80,44
	Pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	68,4
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH	6,9%



## **E. Pemetaan Program Prioritas Wali Kota Medan Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**

1. Revitalisasi pasar tradisional (dinas perdagangan)
2. Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dan taman kota
3. Pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi yang terintegrasi dapat mengurangi kemacetan lalu lintas
4. Kampanye edukasi tentang pengelolaan sampah dan daur ulang
5. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur drainase kota
6. Pembangunan pusat kreativitas anak muda
7. Program pencegahan dan penanggulangan stunting
8. Pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dan budaya
9. Penyediaan air bersih dan sanitasi layak di daerah kumuh
10. Digitalisasi pendidikan berbasis *smart class* dan metaverse

*Dinas Lingkungan Hidup masuk Program Prioritas ke 2 dan ke 4, lihat tabel 3.5*



RENCANA PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025-2029		TABEL 3.5 DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PRIORITAS 2025-2029 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN			
		PROGRAM	INDIKATOR	TARGET (Tahun 2027)	LOKASI
PP 2	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Kota	Pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase RTH	6,9%	Menyebar di Kota Medan
PP 4	Kampanye Edukasi tentang Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	Pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	68,4	Seluruh Kecamatan



## **F. RPJMD Propinsi Sumatera Utara**

Dalam RPJMD Propinsi Sumatera Utara tahun 2024-2030, salah satu yang menjadi permasalahan dan isu strategis adalah berkaitan dengan lingkungan hidup dan kawasan permukiman. Diantaranya :

- 1) Masih adanya perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan yang tidak terkendali;
- 2) Masih adanya masyarakat yang tinggal dirumah tidak layak huni;
- 3) Penanganan sampah yang belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang benar sehingga menimbulkan pencemaran dan juga menyebabkan dampak negatif lainnya bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Hal diatas disebabkan oleh regulasi tentang alih fungsi lahan masih minim, masih terdapatnya pemukiman kumuh serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan persampahan. Untuk menangani permasalahan di atas maka direncanakan untuk dilakukan pengelolaan lingkungan hidup dan sanitasi lingkungan yang lebih baik lagi serta peningkatan infrastruktur pemukiman yang lebih handal dan penegakan hukum yang tegas.

## **G. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Adapun tujuan dari Rencana Kerja (Renja) Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah dan pedoman Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan Kota Medan khususnya dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Terkendalinya sasaran yang telah ditetapkan dalam pembangunan daerah Kota Medan
3. Sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan Dinas



Lingkungan Hidup Kota Medan Sebagai dokumen perencanaan dalam pembangunan daerah, Rencana Kerja (Renja) memiliki sasaran sebagai berikut :

4. Tercapainya integritas dan sinkronisasi antar fungsi penganggaran dan fungsi perencanaan
5. Tercapainya kualitas data/informasi yang dihasilkan dan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
6. Tercapainya sasaran pembangunan kota yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Medan.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Medan namun juga oleh sumber pendanaan lainnya.

Sehubungan dengan rancangan awal rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup



Kota Medan tahun 2027 adalah sebagai berikut:

#### **4.1. Program dan Kegiatan**

Bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada Ranwal Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2027 ini adalah RPJPD Kota Medan, Dokumen SDGs, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2025-2029, RPJMD Kota Medan 2025-2029, Restra Propinsi Sumatera Utara (2024-2026) dan Renstra Kementerian dan Kelembagaan serta RKPD Kota Medan tahun 2024.

Rekapitulasi terhadap rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Kerja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2027 terdiri atas:

1. Jumlah Program sebanyak 11
2. Jumlah Kegiatan sebanyak 21
3. Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 52
4. Pagu Indikatif APBD adalah Rp. 127.756.648.157

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk Tahun 2027 adalah :

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan



## Fungsi

- 1.3.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 1.4.6 Penyediaan Bahan/Material
  - 1.4.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 1.4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 1.4.9 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
  - 1.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan, kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.7.3 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 1.7.4 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung



Kantor atau Bangunan Lainnya

1.8 Penataan Organisasi

1.8.1 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

**2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**

2.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

2.1.1 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota

2.2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

2.2.1 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

**3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

3.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

3.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

3.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

3.1.3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

3.2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

3.2.1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

3.3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

3.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran

**4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**

4.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota



4.1.1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

4.1.2 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

4.1.3 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

## **5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**

5.1 Penyimpanan sementara Limbah B3

5.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)

## **6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**

6.1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

6.1.2 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## **7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**

7.1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7.1.1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup



7.1.2 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

**8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**

8.1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8.1.1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**

9.1 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

9.1.1 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota

9.1.2 Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

**10. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**

10.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

10.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan

10.1.2 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

10.1.3 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

10.1.4 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

**11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

11.1 Pengelolaan Sampah

11.1.1 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

11.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

11.1.3 Penanganan Sampah Melalui Pemilihan dan Pengolahan



Sampah di Instansi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan

#### 11.1.4 Pengulangan Sampah melalui Pembatasan Timbunan Sampah



**Tabel 4.1.**

**Rincian Belanja SKPD Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2027**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah
		Usulan Renja		
		Koefisien	Satuan	
01:03:04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			4.369.895.388
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten/ Kota			4.369.895.388
1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/ TPST/ SPA/ TPA-3R/ TPS	1339	Ton/Hari	405.939.600
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan persampahan	1	Dokumen	131.832.000
1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/ TPST/ SPA/ TPA-3R/ TPS	1339	Ton/Hari	734.400.000
1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/ TPST/ SPA/ TPA-3R/ TPS	2	Unit	3.097.723.788
02:11:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			128.311.183.792
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			524.880.000
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	524.880.000
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			44.016.166.127
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	135	Orang/Bulan	43.877.782.127
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	134.784.000
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	3.600.000
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			974.268.000
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3	Paket	509.268.000
2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150	Orang	291.000.000
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22	Orang	174.000.000



2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			24.867.304.378
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	19.952.662
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2	Paket	694.717.740
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	52.225.806
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6	Paket	22.755.899.200
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3	Paket	230.694.878
2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	4	Paket	72.000.000
2.11.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	50	Paket	61.752.000
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	509.254.092
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	470.808.000
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.868.992.059
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	Unit	4.986.984.888
2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20	Unit	882.007.171
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40.442.569.747
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	38.056.800
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Laporan	451.826.580
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13	Laporan	39.952.686.367
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.413.723.481
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29	Unit	10.293.555.865
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200	Unit	408.807.600
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	Unit	411.996.016
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82	Unit	299.364.000



2.11.01.2.13	Penataan Organisasi			203.280.000
2.11.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	40	Laporan	203.280.000
02:11:02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			476.728.807
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota			239.414.400
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	1	Dokumen	239.414.400
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota			237.314.407
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1	Dokumen	237.314.407
02:11:03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			2.824.888.516
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			2.822.685.316
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	8	Dokumen	1.661.015.539
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	3	Laporan	128.589.296
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3	Laporan	1.033.080.480
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota			1.101.600
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1	Dokumen	1.101.600
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			1.101.600
2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1	Dokumen	1.101.600
02:11:05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			124.236.000
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3			124.236.000



2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1		124.236.000
02:11:04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			30.596.960.090,40
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota			30.596.960.090,40
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	10	Ha	23.483.543.216
2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	1	Unit	408.856.320
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	3000	Unit	6.704.560.554
02:11:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			1.468.800
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.468.800
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	400	Dokumen	367.200
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	205	Badan Usaha	1.101.600
02:11:08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			1.223.720.328
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.223.720.328
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	5	Kegiatan	299.074.565
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	2250	Orang	924.645.763
02:11:09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			487.170.246



2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			487.170.246
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	400	Entitas	487.170.246
02:11:10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			193.908.456
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			193.908.456
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	50	Pengaduan	192.806.856
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	50	Perkara	1.101.600
02:11:11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			2.625.346.650
2.11.11.2.01	Pengelolaan sampah			2.625.346.650
2.11.11.2.01.0018	Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan Timbulan Sampah	1	Laporan	344.271.600
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	18.000	Ton	1.468.800
2.11.11.2.01.0004	Sub Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	10	Kelompok	974.376.534
2.11.11.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan	1	Dokumen	1.305.229.716
	PROGRAM			171.235.507.073
	KEGIATAN			171.235.507.073
	SUB KEGIATAN			171.235.507.073



**Tabel 4.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUR)/SUB KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028
		TARGET	PAGU	PAGU
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			4.369.895.388	4.500.992.250
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	93,48	4.369.895.388	4.500.992.250
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			4.369.895.388	4.500.992.250
Terselenggaranya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	4	4.369.895.388	4.500.992.250
1.03.04.2.01.0013 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				
Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang ditingkatkan (Ton/hari)	1.339	405.939.600	418.117.788
1.03.04.2.01.0015 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	1	131.832.000	135.786.960
1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				
Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	2	3.097.723.788	3.190.655.502
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS- 3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	1.339	734.400.000	756.432.000



2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			166.865.611.685	171.871.580.035
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	BB		
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	524.880.000	540.626.400
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26	44.016.166.127	45.336.651.111
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	135	43.877.782.127	45.194.115.591
2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	134.784.000	138.827.520
2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6	3.600.000	3.708.000
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	974.268.000	1.003.496.040
2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	509.268.000	524.546.040
2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	150	291.000.000	299.730.000
2.11.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				



Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	22	174.000.000	179.220.000
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	9	24.867.304.378	25.613.323.509
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	19.952.662	20.551.241
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	694.717.740	715.559.272
2.11.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	52.225.806	53.792.580
2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	22.755.899.200	23.438.576.176
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	230.694.878	237.615.725
2.11.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/ Material				
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4	72.000.000	74.160.000
2.11.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	50	61.752.000	63.604.560
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150	509.254.092	524.531.715
2.11.01.2.06.0011 – Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	470.808.000	484.932.240



2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23	5.868.992.059	6.045.061.821
2.11.01.2.07.0002 – Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4	4.986.984.888	5.136.594.435
2.11.01.2.07.0011 – Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	882.007.171	908.467.386
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	40.442.569.747	41.655.846.840
2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	38.056.800	39.198.504
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	451.826.580	465.381.377
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	39.952.686.367	41.151.266.958
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314	11.413.723.481	11.756.135.185
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	29	10.293.555.865	10.602.362.541



	dan Perizinannya (Unit)			
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	200	408.807.600	421.071.828
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	411.996.016	424.355.896
2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	82	299.364.000	308.344.920
2.11.01.2.13 - Penataan Organisasi				
Terselenggaranya penataan organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	40	203.280.000	209.378.400
2.11.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	40	203.280.000	209.378.400
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	476728807,2	491030671,4
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				
Terselenggaranya Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	1	239.414.400	246.596.832
2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				
RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	1	239.414.400	246.596.832



2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				
Terselenggaranya penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	237.314.407	244.433.839
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1	237.314.407	244.433.839
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	54,31	2.824.888.516	2.909.635.171
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	80,44		
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
Terselenggaranya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4	2.822.685.316	2.907.365.875
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	8	1.661.015.539	1.710.846.005
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	3	128.589.296	132.446.975
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/ kota				
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	3	1.033.080.480	1.064.072.894
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
Terselenggaranya penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	4	1.101.600	1.134.648



2.11.03.2.02.0001 – Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	1.101.600	1.134.648
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
Terselenggaranya pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4	1.101.600	1.134.648
2.11.03.2.03.0001 – Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran				
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1.101.600	1.134.648
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH (Persentase)	6,9		
2.11.04.2.01 – Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
Terselenggaranya pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2	30.596.960.090	31.514.868.893
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				
Terselenggaranya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	10	23.483.543.216	24.188.049.513
2.11.04.2.01.0009 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan				
Terselenggaranya pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	408.856.320	421.122.010



2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati				
Terselenggaranya pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	3000	6.704.560.554	6.905.697.371
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100	124.236.000	127.963.080
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				
Terselenggaranya penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	1	124.236.000	127.963.080
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				
Terselenggaranya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	1	124.236.000	127.963.080
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	66	1.468.800	1.512.864
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				
Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	245	1.468.800	1.512.864



2.11.06.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				
Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	1	367.200	378.216
2.11.06.2.01.0009 – Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	205	1.101.600	1.134.648
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	90	1.223.720.328	1.260.431.938
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Terselenggaranya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	1.223.720.328	1.260.431.938
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	5	299.074.565	308.046.802
2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				
Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.250	924.645.763	952.385.136
2.11.09 – PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				



Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	70	487.170.246	501.785.353
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	4	487.170.246	501.785.353
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	400	487.170.246	501.785.353
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	193.908.456	199.725.710
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				
Terselenggaranya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2	193.908.456	199.725.710
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	50	192.806.856	198.591.062
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/ kota (Sanksi)	50	1.101.600	1.134.648



<b>2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>				
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	68,4	2.625.346.650	2.704.107.050
<b>2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah</b>				
Terselenggaranya Pengelolaan sampah	Jumlah Pengelolaan sampah (persentase)	24	2.625.346.650	2.704.107.050
<b>2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</b>				
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	10	974.376.534	1.003.607.830
<b>2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</b>				
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	1	1.305.229.716	1.344.386.607
<b>2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</b>				
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	152.459	1.468.800	1.512.864
<b>2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah</b>				
Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	1	344.271.600	354.599.748
<b>Program</b>			<b>171.235.507.073</b>	<b>176.372.572.285</b>
<b>Kegiatan</b>			<b>171.235.507.073</b>	<b>176.372.572.285</b>
<b>Sub kegiatan</b>			<b>171.235.507.073</b>	<b>176.372.572.285</b>



#### 4.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Retribusi pada Dinas lingkungan Hidup terdiri dari 3 sumber :

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Sedot Tinja

Realisasi Retribusi PAD dapat dilihat pada table 4.2.

**TABEL 4.3**  
**REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI**  
**PELAYANAN PERSAMPAHAN, PENJUALAN PUPUK KOMPOS DAN**  
**SEDOT TINJA DESEMBER TAHUN 2025**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SAMPAI BULAN 31-Des-2025</b>	<b>TARGET</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b>4.1.02.01.02</b>	<b>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</b>	<i>Rp 29.320.943.676</i>	<i>Rp 35.056.318.425</i>	83,64%
<b>4.1.02.02.19</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<i>Rp 2.360.000</i>	<i>Rp 0</i>	0%
<b>4.1.02.01.14</b>	<b>Retribusi Sedot Tinja</b>	<i>Rp 17.850.000</i>	<i>Rp 25.000.000</i>	71,40%
<b>TOTAL</b>		<b><i>Rp 29.341.153.676</i></b>	<b><i>Rp 35.081.318.425</i></b>	<b>83,64%</b>



## **BAB V PENUTUP**

Ranwal Renja ini merupakan acuan untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan didefenitifkan nantinya menjadi dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Daerah dan berikutnya akan diimplementasikan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Ranwal Renja juga merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja tahun sebelumnya yang tercantum dalam Rencana Strategis.

### **A. KAIDAH PELAKSANAAN**

Dokumen Ranwal Renja ini merupakan tahapan awal pedoman dalam Penetapan Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kota Meda Tahun 2027 yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun Anggaran 2027. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

Ranwal Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan penting dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya sampai menjelang ditetapkannya dokumen resmi Renja dan sudah menyesuaikan dokumen perencanaan di atasnya (Perubahan RPJMD, Perubahan Renstra dan Ranwal RKPD) dengan memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

### **B. RENCANA TINDAK LANJUT**

Hal-hal penting yang akan dijadikan rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran ranwal renja ini, antara lain:

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang



sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja SKPD pada saat Konsultasi Publik RKPD, Forum SKPD/Musrenbang RKPD;

2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar biro dan SKPD lainnya untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, meskipun perlu disampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif, dimana dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Penyusunan Ranwal Renja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi dokumen resmi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2027, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna finalisasi dokumen renja menjadi defenitif. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2027.

### C. CATATAN PENTING

Tidak semata-mata karena memenuhi Peraturan Perundang-undangan, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memiliki dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Medan juga untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029. Ranwal Renja ini merupakan acuan untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan didefenitifkan nantinya



menjadi dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan berikutnya akan diimplementasikan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Ranwal Renja juga merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja tahun sebelumnya yang tercantum dalam Rencana Strategis.